

## ABSTRAK

Oligarki telah ada sejak Orde baru, keberadaan oligarki hingga kini masih dominan karena memiliki kekayaan (material) dan kekuasaan politik dengan memanfaatkan instrumen demokrasi. Lahirnya Oligarki dapat disebabkan oleh politik dinasti. Peranan gerakan *civil society* dalam menghadapi dominasi elit oligarki begitu penting mengingat salah satu prasyarat demokrasi adalah hubungan antara *demos* (warga Negara) yang memiliki hak hingga kemudian dapat menuntut dan turut serta dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraan.

Penelitian ini berjudul *Civil Society Versus Oligarki* (Studi Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam Meruntuhkan Dinasti Kota Banjar) bertujuan untuk mengetahui upaya Forum Reformasi Dinasti Banjar dalam meruntuhkan dinasti politik yang ada di Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu teori *Civil Society*, Oligarki dan Dinasti Politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Validitas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Reformasi Dinasti Banjar sebagai *civil society* atau kontrol terhadap pemerintah melakukan upaya reformasi dinasti dengan melaporkan dugaan kebijakan yang diwarnai KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) ke pihak yang berwajib yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlahan namun pasti pergerakannya membuahkan hasil. Pelaporan kasus ini berjalan dengan dipanggilnya ketua FRDB dan beberapa pejabat untuk klarifikasi terkait dengan kasus yang dilaporkan Forum Reformasi Dinasti Banjar dan berlanjut dengan penyelidikan oleh KPK yang dilakukan tepatnya pada tanggal 11 Juli 2020 yang dilakukan di rumah 4 kontraktor Kota Banjar, Rumah Kepala Dinas PUPR (Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Ciamis, Kantor PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan Rumah Dinas Walikota sendiri dengan membawa total 8 koper diduga alat bukti. Pengeledahan dilakukan atas dugaan korupsi infrastruktur tahun anggaran 2012-2017 dan hingga saat ini proses hukum masih terus berjalan. Kebijakan-kebijakan dinasti diduga Forum Reformasi Dinasti Banjar diinterfensi oleh oligarki yaitu Herman Sutrisno mantan walikota Banjar dua periode masa jabatan yang secara tidak langsung berkuasa melalui pemerintahan informalnya meliputi pejabat birokrasi, anggota DPRD, pengusaha dan kelompok masyarakat Kota Banjar sehingga kebijakan yang dibuat hanya mementingkan kepentingan kelompok tidak memprioritaskan masyarakat.

**Kata Kunci : *Civil Society*, Oligarki, Dinasti Politik, dan Forum Reformasi Dinasti Banjar**